

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa Revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949, terjadi berbagai peristiwa penting yang melatar belakangi terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satunya perjanjian Linggajati yang ditanda tangani di Jakarta oleh delegasi Belanda dan delegasi Indonesia. Pada perundingan tersebut dibahas suatu panduan untuk membentuk suatu tatanan baru dibekas Hindia Belanda yang kelak dinamakan Negara Indonesia Serikat.

Perwujudan Negara Indonesia Serikat tersebut terancam gagal dikarenakan salah satunya terdapat perbedaan naskah pada saat perundingan Linggajati tersebut. Dalam keadaan lain terdapat ketidakpercayaan politik antara Belanda dan Republik Indonesia. Ditambah kedua belah pihak militer yang saling melancarkan serangan diberbagai tempat yang ada di Jawa dan Sumatra. Akibat perseteruan tersebut Belanda geram lalu menggunakan senjata untuk memaksakan keinginannya. Pada 20 Juli 1947 terjadilah peristiwa Agresi Militer I.¹ Kejadian tersebut diketahui oleh Dewan Keamanan PBB dengan segera memerintahkan kedua belah pihak untuk menghentikan perang dan melanjutkan perundingan.

Pada tanggal 25 Agustus 1948 Dewan kemanan PBB mengeluarkan dua Resolusi, pertama menghimbau pemerintah Belanda untuk mewujudkan Negara Indonesia Serikat. Resolusi kedua berisi himbauan untuk membentuk suatu tim

¹ Suparwoto dan Sugiharti, *Sejarah Indonesia Baru (1945-1949)* (Surabaya: University Press, 1997). hlm 7

yang akan membantu perundingan-perundingan antara Belanda dan Republik yang disebut dengan Komisi Tiga Negara (KTN).²

KTN berusaha membimbing kedua belah pihak tersebut secara tidak memaksakan. Namun betapapun juga KTN berhasil tercapainya suatu perjanjian yang terdiri dari 12 pasal yang ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948. Karena perundingan tersebut dilaksanakan diatas kapal tentara Amerika Serikat, USS Renville, maka perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian Renville.³

Persetujuan Linggajati, Perjanjian Renville juga menjadi patokan untuk membentuk Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Tetapi dalam perundingan tersebut timbul berbagai paham yang sangat tajam antara pihak Republik dan Belanda. Perbedaan tersebut menyangkut pembentukan Pemerintahan Sementara (interim) sebelum Negara Indonesia Serikat dibentuk. Selain itu pihak Republik mempertanyakan statusnya dalam masa pemerintahan sementara itu, apakah masih tetap sama seperti adanya atau harus disamakan dengan negara-negara yang dibentuk diluar dan didalam wilayah RI.

Permasalahan status RI itu terus mencuat bahkan dalam rapat tanggal 13 Januari 1948 antara KTN dengan delegasi RI. Dalam rapat itu pihak RI menanyakan status RI selama Pemerintahan Sementara yang tidak jelas diatur dalam pasal 1 dari enam pasal tambahan tersebut. Delegasi RI menegaskan dalam rapat itu, bahwa RI tidak bisa disejajarkan dengan negara-negara bagian yang ciptakan sejak tahun

² Sarjono R, Peran, 'Australia dalam penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda melalui perundingan Renville', *Jurnal Ilmiah Guru*, Vol.01 (1999). hlm 28

³ *Ibid.* hlm 22.

1946. Sementara itu KTN mencoba meyakinkan delegasi RI bahwa statusnya tidak berubah.

Mengetahui sifat yang mendua itu menimbulkan banyak permasalahan dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Belanda beranggapan bahwa dalam Pemerintahan Sementara itu RI hanya salah satu negara bagian. Sedangkan RI berpegang dengan pernyataan dari KTN yang menyatakan status RI tidak berubah. Berdasarkan kenyataan itu dalam perundingan-perundingan selanjutnya pihak Belanda menuntut agar Republik Indonesia menerima kedaulatan Belanda diseluruh wilayah Hindia Belanda dalam masa Pemerintahan Sementara. Akibat dari sikap Belanda yang terkesan merugikan pihak Republik, Maka Republik tetap pada pendiriannya bahwa RI tidak sama dengan negara bagian yang didirikan Belanda. Karena kedua pihak tetap pada pendiriannya maka perundingan-perundingan tidak dapat melangkah maju dan pada akhirnya terhenti sama sekali.

Mengetahui Suasana yang tidak pasti tersebut van Mook mengambil inisiatif untuk merubah tatanan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Untuk menyebarluaskan gagasannya itu van Mook pada bulan Mei 1948 mengundang para pemimpin dan perwakilan dari negara-negara bagian dan daerah otonom untuk berapat di Bandung. Pada kesempatan itu Van Mook dan stafnya mengajukan sebuah konsep yang telah disusun sebelumnya mengenai pembentukan Pemerintahan Federal Sementara. Sedangkan dapat dipahami bahwa Pemerintahan Federal Sementara merupakan sebuah pemerintahan yang pada dasarnya merupakan pemerintahan yang sudah ada bahkan hanya berganti nama saja. Setelah Van Mook menjelaskan gagasannya maka berakhir pula rapat yang telah diselenggarakan oleh Van Mook.

Namun Van Mook sepertinya tidak memperhitungkan bahwa dikalangan daerah otonom akan melawan. Pada tanggal 7 Juli 1948 di Bandung.⁴Anak Agung mengadakan rapat tandingan, karena pada saat rapat dengan Van Mook tidak diberi ruang untuk mengajukan perubahan-perubahan. Atas inisiatif dari Negara Indonesia Timur yang dipimpin oleh Anak Agung dan Negara Pasundan dengan mengajak kembali negara bagian lainnya untuk membuat rapat tandingan didalamnya dan van Mook tidak diikuti sertakan. Disela-sela rapat yang belum dibuka Sultan Hamid mencoba mengumpulkan sejumlah peserta yang telah hadir. Pada kesempatan itu Sultan Hamid menuduh bahwa Anak Agung sebagai antek Republik. Maka dibuka kembali rapat itu, Jalanya rapat pada saat itu sangat alot dari tanggal 15 sampai 18 Juli 1948. Sebab pihak Sultan Hamid dan Anak Agung Berbeda pemahaman. Sehingga kedua kubu tersebut membuat momerendum masing-masing. Pihak Anak Agung menginginkan pemerintahan Federal sementara yang dipimpin oleh sebuah direktorium yang terdiri dari tiga orang Indonesia dan dipilih oleh para pemimpin negara bagian. Sedangkan pihak Sultan Hamid menginginkan sebuah sistem Federal seperti Negara Amerika Serikat.

BFO resmi dibentuk di Bandung dengan nama *Staatkundige Eenheden Conferentie* (Konferensi Satuan-Satuan Kenegaraan) namun seiring berjalannya waktu lebih dikenal dengan *Bijeenkomst Federale Overleg* (BFO) atau Pertemuan Musyawarah Federal. Tokoh yang terpilih sebagai Ketua BFO adalah Mr.Tengkoe

⁴ Leirissa. *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006). hlm 114

Bahriun (Negara Sumatra Timur), Wakil Ketua I Mohammad Hanafiah (Banjar), Wakil Ketua II Sultan Hamid II (Kalimantan Barat), dan Sekretaris Mr. A.J. Vleer.⁵

Pada bagian dari BFO ini ada salah satu tokoh yang memberikan gagasan mengenai pembentukan negara federal yang tidak tertitik fokus kepada permasalahan antara Anak Agung dan van Mook. Ia memberikan gagasan tersebut bukan berdasarkan anti Indonesia dan mendukung Belanda, tetapi Ia lebih mementingkan daerahnya yang dikarenakan Ia sebagai pemimpin Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Sultan Hamid selain menjabat. Ia juga sebagai pejuang federalisme Bagi Sultan Hamid bentuk bangunan Pemerintahan Federal dasarnya memang sudah termaktub dalam pembagian sebelum perang dalam provinsi-provinsi yang meliputi Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Timur Besar. Adapun pembentukan Azas Federal sebab ada beberapa alasan yang mendukung terbentuknya Negara Federal. Sebab karena perjuangan melawan Belanda hanya sia-sia dan hanya menyengsarakan rakyat. Maka dengan menerima tawaran bentuk Negara federal maka mereka dapat menghindari kerusakan fisik yang besar.

Sultan Syarif Hamid II seorang Sultan yang berasal dari kesultanan Qadriyah Pontianak merupakan putra sulung dari Sultan Syarif Muhammad Alqadrie dan ibunya bernama Syecha Jamilah Syarwani⁶. Sultan Hamid semasa kecil sudah tertarik dengan dunia kemiliteran. Perjalanan Sultan Hamid bermula ketika menempuh pendidikan *Europeesche Lagere School* (ELS) di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung.

⁵ Leirissa, *Kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006). hlm 121

⁶ Taufik Hidayat, 'Pemikiran Politik Sultan Hamid II Tentang Bentuk Negara', *Jurnal ilmu politik*, Vol. 6 No 3 (2018). hlm 7

Pada saat Pendidikan *Hogereburgerschool* (HBS) di Bandung. Ia menghabiskan waktu hanya satu tahun, setelah itu ia ke *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (THS) Bandung disana ia tidak tamat. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya KMA (sejenis Akademi Militer) di Breda, Belanda untuk mengejar impiannya masuk kemiliteran. Setelah lulus dari sekolah militer di Belanda pada tahun 1937, kemudian ia dilantik sebagai letnan *Koninklijke Nederlands Indische Leger* (KNIL) dengan pangkat letnan dua. Dalam bertugas ia pernah ditempatkan di wilayah Bandung, Malang dan Balikpapan.

Selama kariernya Sultan Hamid sempat ditahan oleh Jepang kurang lebih tiga setengah tahun. Hamid dibebaskan setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Ia lalu pulang ke Kalimantan karena mendapat kabar bahwa ayahnya dibunuh oleh tentara Jepang. Pada saat itu sedang terjadi kekosongan kekuasaan Pontianak dan naiklah Hamid sebagai Sultan Qadriyah. Selama menjabat sebagai Sultan ia berhasil mempersatukan wilayah Kalimantan dibawah naungan Kerajaan Qodriyah dan mendeklarasikan sebagai Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Pada tanggal 13 Januari 1949, Sultan Hamid II terpilih sebagai Ketua BFO menggantikan ketua sebelumnya, pemilihan tersebut berdasarkan hasil pemilihan dari 13 negara bagian.⁷

Pertemuan Musyawarah Federal setelah itu dipimpin Sultan Hamid dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengadakan hubungan dengan para pembesar Pemerintah Republik di Bangka. Pada tanggal 15 Januari 1949 Pertemuan Musyawarah Federal mengadakan rapat untuk membentuk komisi penghubung yang mendapat tugas untuk mengadakan perundingan-perundingan yang perlu

⁷ Leirissa, *kekuatan Ketiga Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006). hlm 187

secara tak resmi dengan para pembesar Pemerintah Republik ini dan orang-orang terkemuka lain Republik.

Komisi penghubung pertama-tama harus mencari tahu, bagaimana pendapat orang-orang pemerintah ini tentang pembentukan Pertemuan Musyawarah Federal sebagai pelopor yang merdeka dan berdaulat. Para pembesar Pemerintah Republik di Bangka bersedia untuk menerima komisi hubungan Pertemuan Musyawarah Federal. Sultan Yogyakarta tidak mau menerima komisi ini, karena ia tidak mau mengadakan perundingan dengan siapa pun, sebelum bermufakat dengan Soekarno, Hatta dan lain-lain.

Pertemuan Musyawarah Federal memutuskan untuk mengadakan hubungan yang pertama dengan para pemimpin Republik. Komisi penghubung dipimpin oleh Perdana Menteri Indonesia Timur. Sebelum berangkat ke Bangka, pemimpin komisi penghubung masih sempat bicara dengan Beel untuk mengetahui perkembangan politik terakhir di Negeri Belanda mengenai pembentukan tertib hukum baru. Beel menggaris bawahi bahwa rencananya mengenai penyerahan kedaulatan yang dipercepat, akan menjadi dasar bagi langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Belanda untuk mewujudkan tertib hukum baru. Ada empat pokok utama rencana itu, yang tak boleh menyimpang dari situ, yakni penyerahan kedaulatan yang dipercepat waktunya dengan cadang kecualian-kecualian untuk sementara. Pembentukan Uni pada waktu yang serempak. Pembentukan Pemerintah Federal Sementara selambat-lambatnya tanggal 1 Maret yang akan datang, dengan maupun tanpa kerjasama para pemimpin Republik, atas dasar

keputusan Peraturan Ketataprajaan Masa Peralihan, Menyingkirkan campur tangan Dewan Keamanan.

Mula-mula para pemimpin Republik tidak setuju mengadakan perundingan secara tak resmi dengan Pertemuan Musyawarah Federal, karena mereka belum memperoleh kebebasan bergerak. Kemudian mereka ubah sikap mereka yang keras itu dan komisi penghubung diterima oleh Soekarno, Hatta dan Hadji Agoes Salim, Leimena dan lain-lain pada tanggal 7 Februari 1949 untuk bertukar pikiran secara tidak resmi.

Para pemimpin Republik telah menyatakan keinginannya, bahwa mereka mau melanjutkan perundingan dengan Pertemuan Musyawarah Federal, asal Pertemuan Musyawarah Federal sudi mengakui status mereka sebagai Pemerintah Republik. dan mereka tidak lagi dipandang sebagai tokoh tokoh pribadi. Pada akhir pembicaraan telah diputuskan bahwa komisi penghubung Pertemuan Musyawarah Federal pada waktu yang akan di tentukan kemudian akan mengadakan perundingan lebih lanjut dengan para pembesar Pemerintah Republik. Di dalam perundingan ini mereka akan membicarakan situasi politik Indonesia pada umumnya dan mengenai pembentukan Pemerintah Federal Sementara dan pembangunan ketatanegaraan pada khususnya.

Pada tanggal 15 Februari 1949 Pertemuan Musyawarah Federal yang lengkap dipanggil untuk berapat, guna memenuhi tugas menyusun komisi penghubung tersebut. Komisi penghubung ini akan dipergunakan sebagai penuntun untuk mengadakan pembicaraan yang bersifat penjajakan dengan para pejabat pemerintah. Karena pendapat-pendapat itu berbeda satu dengan yang lain, maka

habis waktunya berminggu-minggu sebelum Pertemuan Musyawarah Federal mengambil suatu keputusan.

Beberapa daerah-daerah, seperti Kalimantan Barat, Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Bangka, Riau, Belitung dan Dayak Besar. berpendapat bahwa, bila para pemimpin Republik tidak mau turut dalam perundingan karena status mereka tidak diakui sebagai wakil-wakil Republik. Pertemuan Musyawarah Federal harus jalan terus memberikan bantuannya dalam pembentukan Pemerintah Federal Sementara berdasarkan rencana Beel. Beberapa daerah-bagian lain, seperti Indonesia Timur, Pasundan, Madura, Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur, berpendapat bahwa pembentukan Pemerintah Federal Sementara dengan ikutsertanya Republik merupakan syarat mutlak. Pemerintah Indonesia Timur karena itu mengajukan suatu memorandum kepada Pertemuan Musyawarah Federal, untuk menjelaskan lebih lanjut pendiriannya mengenai soal yang asasi ini.

Pada 2 Maret 1949, diberangkatkan kembali komisi penghubung ke Muntok (Bangka) yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua, Sultan Hamid II dan Anak Agung bersama Mr. Djumhana (Pasundan), Dr. Ateng Kartanahardja (Jawa Timur), Raja Kaliamyah Sinaga (Sumatra Timur). Tokoh yang hadir dari pihak Republik Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta disertai Mr. Asaat, Dr. Leimena, H. Agus Salim, Mr. Roem, Dr. Soepomo, Mr. Abdul Karim, dan Mr. Sujono. BFO menjelaskan pada pihak RI bahwa dalam mencari penyelesaian Indonesia dengan Belanda mengusulkan Konsensus Inter-Indonesia diantara semua diseluruh Indonesia akan dapat tercapai cita-cita kemerdekaan. Pada 14 April 1949, diadakan

rapat kembali untuk membahas rencana penyerahan kedaulatan Belanda kepada bangsa Indonesia dan untuk menindaklanjuti hasil kerja dari komisi penghubung.

Pada tanggal 2 Agustus 1949 Sultan Hamid II selaku Ketua BFO dan Ketua Konferensi Inter-Indonesia II membuka sidang penutup, ia menyampaikan:

“...terima kasih bukan hanya karena harapan dan kepercayaan bahwa pertemuan ini kan berhasil telah terbukti, tetapi juga telah membuktikan dan memperlihatkan kepada pihak luar bahwa kita bersatu dalam cita dan tujuan. Beberapa hari lagi kita akan berangkat ke Belanda untuk turut serta dalam KMB dengan semangat yang telah mempengaruhi kita disini semangat persamaan dan persaudaraan...”⁸

Pembentukan Republik Indonesia Serikat merupakan jalan utama agar kedaulatan Indonesia diakui Belanda. Ini merupakan langkah yang tepat untuk kemajuan Indonesia pada saat itu dengan hadirnya Republik Indonesia Serikat sebagai solusi akibat dari persetujuan antara Belanda dengan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akhirnya dapat merumuskan topik masalah sebagai hasil dari beberapa sumber dan penelusuran-penelusuran buku-buku dan rujukan yang lain, sehingga terciptalah sebuah topik masalah yaitu “Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst voor Federale Overleg* (BFO) dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1948-1949”. Alasan penulis mengambil waktu pada tahun 1948-1949 ialah agar peneliti bisa fokus kepada peranan yang dilakukan Sultan Hamid selama menjadi ketua BFO sampai dengan pemberian kedaulatan Indonesia tahun 1949 di KMB.

⁸ Rizky Kusumo', *Dua sisi sultan hamid II, Pencetus Lambang Negara dan Pendukung Negara Federal*, <<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/08/02/dua-sisi-sultan-hamid-ii-pencetus-lambang-negara-dan-pendukung-negara-federal>>. Diakses pada tanggal, 24 desember 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan sebuah identifikasi masalah yang akan diteliti. Pada umumnya, identifikasi dilakukan guna untuk mencari dan mencapai suatu sasaran dari rumusan masalah dan berusaha mengidentifikasi topik yang akan menjadi titik fokus dari penelitian tersebut. Rumusan masalah yang diajukan akan dibahas dalam proses penelitian secara sistematis.⁹ Oleh sebab itu, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1948-1949”.

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar dalam pembahasannya maka penulis memfokuskan titik rumusan masalah tersebut menjadi pertanyaan yang sesuai dengan melihat dari latar belakang masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Profil Sultan Syarif Hamid II ?
2. Bagaimana proses terbentuknya *Bijeenkomst voor federale overleg* (BFO)?
3. Bagaimana Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat Tahun 1948-1949 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan Profil Sultan Syarif Hamid II.

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2016). hlm 25

2. Mendeskripsikan proses terbentuknya *Bijeenkomst voor overleg* (BFO).
3. Mendeskripsikan Peranan dari Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1948-1949.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan yang dilakukan Sultan Hamid II Sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1948-1949. Dengan begitu hasil dari Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan juga diharapkan mampu memberikan dampak baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dan sumbangsih ilmu pengetahuan serta baik untuk meningkatkan kesadaran sejarah serta memberikan informasi mengenai peranan dari Sultan Syarif Hamid II itu sendiri sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1948-1949.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi peneliti, agar mengetahui bagaimana peranan dari seorang tokoh Sultan Syarif Hamid II dalam menjadikan Indonesia negara yang berdaulat.

1.4.3 Kegunaan Empiris

Penulis berharap bahan penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengkaji kesejarahan lebih mendalam dan bisa menemukan makna yang lebih mendalam lagi.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1. Kajian Teoritis

1.5.1.1 Teori Peranan

Peranan yang dimaksud disini lebih banyak merujuk pada fungsi dalam penyesuaian diri, dan suatu proses. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian dari atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya peristiwa atau suatu hal. Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang dalam kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dapat dipengaruhi dari lingkungan, baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil.

Peran sendiri memiliki banyak makna berikut beberapa penjelasannya. Pertama, suatu penjelasan sejarah menyebutkan, konsep peranan diambil dari Yunani yang dipakai pada saat itu sebagai teater namun merujuk pada karakterisasi dari seorang yang membawakan untuk pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang mengarah pada ilmu sosial, artinya peran sebagai fungsi ketika seseorang menduduki jabatan dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang bersifat operasional, maksudnya ketika seseorang menjadi aktor maka faktor tersebut memiliki batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berbeda

dalam suatu penampilan.¹⁰Teori peranan beranggapan bahwa peranan seseorang itu merupakan hasil interaksi diri dengan posisi (status dalam masyarakat) dan dengan peran (meyangkut norma dan nilai).

Menurut Soejono Soekanto, pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Oleh sebab itu, Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia juga melaksanakan dan menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara peranan dan kedudukan terletak pada kepentingan ilmu pengetahuan Tak ada peranan tanpa kedudukan, Keduanya memiliki ketergantungan dan tak dapat dipisahkan. Tidak ada kedudukan tanpa peranan.¹¹

Dari sudut pandang Rivai, juga mengatakan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Jika diartikan dengan peranan sebuah pemerintahan maka dapat diartikan sebagai sebuah perangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/pemerintahan sesuai dengan instansi tersebut. Dari pemaparan tersebut jelas bahwa peran yang dimaksud sangat dipengaruhi oleh posisi yang didudukinya, jadi seseorang dikatakan menjalankan perannya dikarenakan sebuah kedudukan yang disandangnya.¹²

Dengan beberapa pandangan teori para ahli tersebut, sudah jelas sekali mengenai sudut pandang peranan ini. Maka konsepsi dari peranan ini yang dijadikan sebagai acuan atau patokan untuk meneliti Peranan

¹⁰ Edy Suhardono, *Teori peranan konsep, derivasi dan implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994). hlm 20

¹¹ Soekanto Soerjono, *Sosiologis Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). hlm 98.

¹² Reza Syahputra, 'Peran Dinas Kota Dalam Pencegahan Penyakit HIV/AIDS di Kota Samarinda', Fakultas Ilmu sosial dan Politik, Universitas Mulawarman, *ejournal Ilmu pemerintahan*, vol, 3. 4 (2015).

Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1948-1949 dalam melihat arti peranan yang beliau lakukan.

1.5.1.2 Teori Diplomasi

Secara umum pengertian diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi yang dijalankan seorang diplomat yang sering kali mewakili sebuah negara atau organisasi. Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu Negara. Diplomasi merupakan alat utama dalam pencapaian nasional berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini sebuah negara dapat membangun jati dirinya.

Pada umumnya hubungan antara negara sebaiknya diterapkan sejak tingkat paling awal, untuk selanjutnya kedua negara dapat melakukan hubungan bilateral dengan negara lainnya. Menurut G.R Berridge, konsep diplomasi ialah merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar dan mempertahankan kepentingan tujuannya melalui negosiasi, tanpa menggunakan kekerasan, propaganda atau hukum¹³. Diplomasi terdiri dari komunikasi antar sejumlah pihak yang dirancang untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan menurut Sir Earnest konsep diplomasi sebagai penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintahan negara-negara berdaulat.¹⁴

¹³ Berridge, G.R. *diplomacy: Theory and Practice* (New York; palgrave, 2010, hlm 11

¹⁴ Rizki Rahmadini Nurika. 'Peranan Globalisasi dibalik munculnya tantangan baru bagi diplomasi di era kontemporer'. *Jurnal sosial politik*. Vol, 1 (2017), hlm 126-141.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep diplomasi berkenaan dengan maksud kepandaian seseorang dalam pelaksanaan hubungan antar negara ataupun organisasi untuk mencapai kesepakatan atau mendapat pengakuan dari negara berdaulat. Maka dengan itu arah penelitian ini sesuai dengan penjelasan diatas mengarah pada Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1948-1949.

1.5.1.3 Teori Kepemimpinan

Definisi tentang kepemimpinan banyak sekali variasi yang dipahami oleh banyak orang. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah kemampuan yang dilakukan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, orang banyak ataupun kelompok tertentu. Dengan keinginan masing-masing dalam keadaan tertentu didalam organisasi, teori kepemimpinan merupakan komponen fundamental dalam menganalisa suatu proses dinamika dalam suatu organisasi. Kepemimpinan dapat dipahami dalam 2 pengertian, pertama sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang, kedua mempengaruhi orang.

Menurut Jhon Gardner Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas. Kepemimpinan hanya sebuah alat sarana atau proses untuk mempengaruhi orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Ada berbagai macam faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu, karena ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan.¹⁵Kepemimpinan proses

¹⁵ Encep Syarifudin, 'Teori kepemimpinan', *Jurnal Teori Kepemimpinan*, Vol. 21 (2004), hlm 461.

mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal ada apabila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial didalam sebuah organisasi. Sedangkan sumber pengaruh tidak formal muncul diluar organisasi formal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian kepemimpinan yang efektif dalam hubungannya dengan bawahan adalah pemimpin yang mampu meyakinkan mereka bahwa kepentingan pribadi dari bawahan ialah visi misi, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin mencari pemahaman dari kepemimpinan Sultan Syarif Hamid II , bagaimana ia mempengaruhi atau menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuannya.

1.5.2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan bacaan yang mempunyai peran penting dengan peneliti guna untuk membantu peneliti mencari validitas penelitian tersebut. Dengan kajian pustaka ini diharapkan penulis mampu bisa mencari sumber-sumber terkait. Maka dari itu dalam kajian pustaka ini sangat membantu penulis dalam penelitian kali ini, dengan adanya kajian pustaka ini diharapkan bisa mengungkap lebih dalam terkait penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. kajian ini juga dapat membantu dalam mengkaji prosedur-prosedur yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dengan begitu penulis akan lebih mudah mendalami konsepsi landasan teori yang nantinya akan berkaitan dengan masalah yang diteliti nantinya.

Sehingga dalam pengkajian kelebihan dan kekurangan dalam hasil penelitian terdahulu bisa disesuaikan dengan penelitian ini.

Pada penulisan proposal ini, penulis telah mendapatkan beberapa sumber yang nantinya akan digunakan sebagai bahan studi pustaka pada penelitian ini. Buku yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Ashari dkk, dengan judul buku Biografi Politik Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara. Dalam buku ini sudah menjadi representatif penelitian ini. Karena sudah menjelaskan siapakah sosok Sultan Syarif Hamid II dan bagaimana ia menciptakan lambang garuda untuk Republik Indonesia Serikat.

Buku yang kedua adalah tulisan Ide Anak Agung Gde Anak yang berjudul Renville ini menjelaskan bagaimana pembentukan Negara Republik Indonesia serikat, buku yang ketiga mengenai kekuatan ketiga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ditulis oleh Leirissa, didalamnya menjelaskan sudut pandang mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dengan beberapa sumber kajian pustaka yang telah didapat oleh penulis akan lebih mempermudah penelitian terhadap Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949.

1.5.3. Historiografi Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dan dapat dijadikan acuan ataupun rujukan dan dapat dijadikan sumber bagi penulis dalam penelitian, baik berupa sumber berbentuk buku, jurnal, artikel, skripsi atau yang lainnya yang berkaitan

dengan masalah yang sedang diteliti, berikut beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan kajian Pustaka.

Penelitian terdahulu yang didapatkan yaitu berupa skripsi yang ditulis oleh Vinsensius Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, yang berjudul *Sultan Hamid II Berwajah Ganda Dalam Karier Politiknya Di Indonesia*. penelitian ini membahas mengenai bagaimana Sultan Hamid II berwajah ganda dalam karier politikanya di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Vinsensius ingin memperlihatkan bagaimana sikap politik Sultan Hamid dalam memanfaatkan belanda dan juga ingin memperlihatkan sikap nasionalisme Sultan Hamid kepada Indonesia.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Vinsensius terletak pada fokus penelitian. Dimana dalam penelitian Vinsensius berfokus kepada karier politik Hamid dan nasionalisme. Perbedaan selanjutnya terletak pada metode yang digunakan, Vinsensius menggunakan metode Deskripsi analisis. Pada penelitian Vinsensius tidak menggunakan tahun. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Metode yang digunakan penulis menggunakan metode historis.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian Vinsensius terletak pada objek yang diteliti yakni Sultan Hamid, lalu persamaan yang lainya terletak pada penjelasan mengenai profil Sultan Hamid II semasa kecil, sedangkan Penelitian penulis pun sama mengangkat rumusan masalah mengenai riwayat hidup atau Profil dari Sultan Hamid.

Penelitian terdahulu kedua adalah skripsi penelitian yang ditulis oleh Teguh Agustina dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul *Eksistensi Tokoh Sultan Hamid II Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (1943-1955)*. penelitian ini membahas bagaimana eksistensi tokoh Sultan Hamid II pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia (1943-1945).

Dalam penelitian yang dilakukan Teguh Agustina ingin menunjukkan bahwa Sultan Hamid memiliki cara tersendiri dalam peranan pemikiran politiknya, selain itu eksistensinya dalam mencapai proses perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan ikut serta dalam berbagai konferensi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Agustina terletak pada fokus penelitian dimana tulisan Teguh Agustina berfokus pada eksistensi perjuangan Sultan Hamid dalam kemerdekaan sampai peristiwa Westerling. Metode yang digunakan Teguh ialah metode sejarah kritis. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis tertuju pada peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949. Persamaan penelitian yang dilakukan Teguh Agustian terletak pada objek yang diteliti yakni Sultan Hamid, lalu eksistensinya untuk republik Indonesia serikat.

Pada penelitian ketiga yaitu tulisan Rizqi Novita Sari dan Sugiharti dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul *Dinamika Badan Permusyawaratan Federal (BFO) Menuju Kedaulatan Indonesia*. Penelitian ini membahas mengenai dinamika badan permusyawaratan federal,

pemberitaan surat kabar untuk memperkeruh pandangan republik terhadap federal.

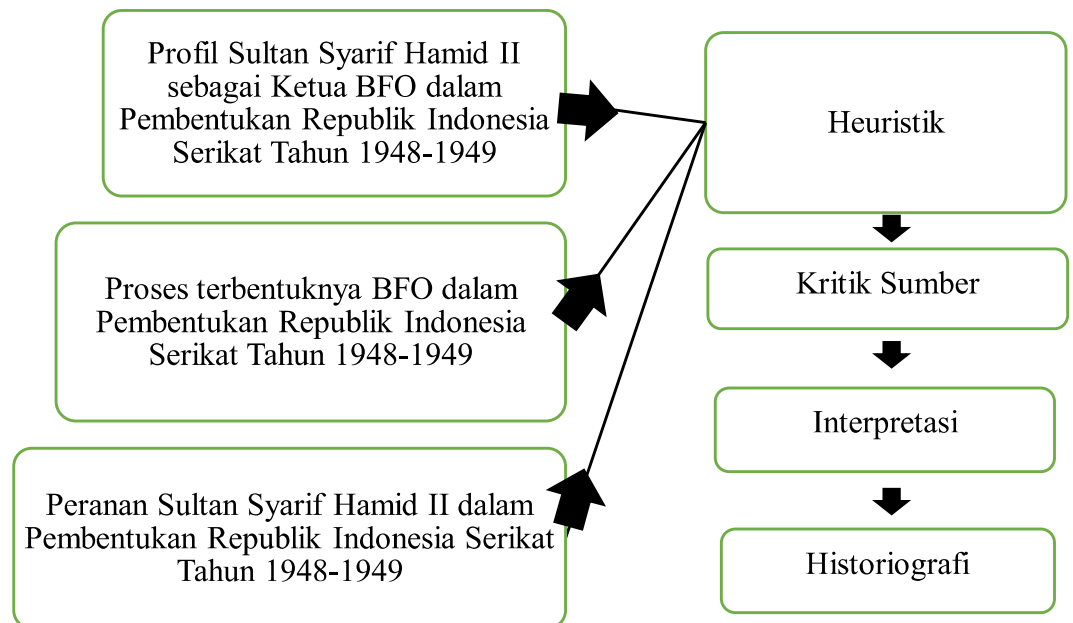
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Novita Sari dan Sugiharti dengan penulis terletak pada fokus penelitian dimana tulisan Rizqi dan Sugiharti berfokus pada peran BFO dalam mendapatkan kedaulatan Indonesia dan pemberitaan surat kabar merdeka dan pelita rakyat. Sedangkan fokus penelitian penulis berfokus pada peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat Tahun 1948-1949. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian Rizqi Novita Sari dan Sugiharti yakni tentang BFO, lalu persamaan lainnya terletak pada metode yang digunakan yakni metode historis.

Hasil dari penelusuran hasil-hasil penelitian yang terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan judul penelitian saya yang berjudul peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1948-1949 layak dilaksanakan penelitiannya.

1.5.4. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan hal yang paling penting dalam sebuah karya penelitian, dengan adanya konsep atau gambaran, penulis dapat membatasi serta lebih mengarahkan penelitian pada topik yang sedang diteliti. Kerangka konseptual dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara umum. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan mengenai Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1948-1949. Dalam

penelitian ini menggunakan batasan waktu dikarenakan agar lebih fokus terhadap Peranan dari Sultan Syarif Hamid II tersebut.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas terlihat bahwa penulis mengkaji seputar pembentukan Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949 yang berfokus pada peranan yang dilakukan Sultan Hamid II sebagai *Bijeenkomst voor federal overleg*. Penjelasan akan dimulai dari kajian Profil Sultan Syarif Hamid II bagaimana riwayat hidup beliau. Kemudian bagaimana proses terbentuknya *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) sampai beliau terpilih menjadi Ketua BFO. Kemudian bagaimana peranan yang beliau lakukan dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949.

1.6 Metode Penelitian Sejarah

Metode historis sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam pengumpulan sumber sejarah dan menilai secara kritis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini tetap mengacu pada penelitian metode sejarah. Ada

beberapa tahapan antara lain: Heuristik (pengumpulan data), Kritik Sumber (internal dan Eksternal), Interpretasi (penafsiran) dan Historiografi (penulisan sejarah).¹⁶

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan yang berusaha menjelaskan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Konsekuensi yang terjadi adalah kecenderungan yang berkenaan dengan masalah yang berkembang, namun juga mempertimbangkan peristiwa masa lampau dengan pengaruh yang terjadi pada masa kini.¹⁷

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian historis karena penelitian ini menunjukkan fakta-fakta sejarah mengenai Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1948-1949. Selain itu, untuk menunjang pengumpulan data peneliti juga menggunakan teknik studi putaka dengan mengumpulkan sumber-sumber buku yang relevan dengan penulisan peneliti yang dituju. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan cara mengumpulkan sumber sebanyak mungkin yang kredibel. Teknik analisis data yang digunakan yakni dengan terjun langsung kelapangan, kemudian dirangkum, disusun secara sistematis dan dipilih berdasarkan hal pokoknya. Untuk memperoleh data peneliti turun langsung ke tempat sumber buku seperti perpustakaan nasional atau ketempat penjualan buku yang lengkap dan sesuai dengan penulisan penelitian, peneliti juga mencari e-book literatur dari internet.

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995), hlm 89-105.

¹⁷ Moleong, L. J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ReMajaRosda Karya, 2016), hlm 89.

1.6.1 Heuristik

Heuristik adalah proses pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan. Heuristik merupakan langkah awal sebagai sebuah kegiatan untuk mencari sumber-sumber, mendapatkan data, mater sejarah atau evidensi sejarah. Untuk memperoleh sumber-sumber biasanya diperoleh dari buku-buku, dokumen, catatan pribadi dan saksi yang pernah mengalami peristiwa sejarah. Adapun pada tahapan ini seorang peneliti diharapkan mampu mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dan mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dimasa lampau. Tahap heuristik ini pun merupakan cara untuk menghimpun sumber data yang telah ditemukan diberbagai tempat. Dalam langkah untuk melakukan heuristik tidak diperlukan peraturan yang sifatnya umum karena heuristik suatu teknik yang memerlukan keterampilan dalam mencari data-data seperti sumber jejak sejarah dimasa lampau. Berikut beberapa buku yang dapat digunakan sebagai sumber data diantaranya:

- 1) Mencari Telur Garuda oleh Nanang R. Hidayat tahun 2008
- 2) Biografi Politik Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara oleh Anshari Dimiyati tahun 2013
- 3) Renville oleh Ide Anak Agung tahun 1991
- 4) Kekuatan ketiga dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh Leirissa Tahun 2006
- 5) Menuju Republik Indonesia Serikat oleh Mangunwijaya Tahun 1999

1.6.2 Kritik sumber

Kritik sumber merupakan tahapan dalam menyingkirkan bahan-bahan yang tidak autentik atau tidak sah. Pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenaran sumber-sumber sejarah yang sebelumnya didapatkan melalui proses heuristik. Tahap kritik sumber ini pun terbagi menjadi dua, pertama yakni kritik internal dan kedua yakni kritik eksternal. Kritik Internal merupakan kegiatan menguji kredibilitas sumber data yang diperoleh, sedangkan kritik eksternal merupakan kegiatan untuk menguji keaslian sumber data yang diperoleh.

1.6.3 Interpretasi

Langkah ketiga dalam penelitian adalah tahap interpretasi, penulis akan menafsirkan atau pemahaman dari data dan juga sumber. Menurut Bekker interpretasi yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta yang dimunculkan dari data-data yang sudah terseleksi atau kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencari sumber yang autentik yang disesuaikan dengan tema yang akan dibahas. Interpretasi ini sering disebut juga analisis sejarah. Analisis berarti menguraiak secara terminologis sedangkan sintesis menyatukan data-data yang ada. Analisis sintesis ini dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi.¹⁸Pada tahap ini penulis menafsirkan data yang telah terkumpul dan data yang telah lulus kritik sumber pada tahap kritik internal maupun kritik eksternal sehingga lulus data untuk dijelaskan dengan kosepsi lebih mengarah kepada Peranan Sultan Syarif Hamid II

¹⁸ Kuntowidjoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995). hlm 100.

sebagai *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949.

1.6.4 Historiografi

Historiografi merupakan bagian dari tahapan penulisan kisah sejarah. Yang merupakan tahapan dalam merekonstruksi penulisan data sejarah oleh sejarawan menjadi sebuah kisah sejarah yang dapat diterima dan dikonsumsi oleh publik. Tahapan historiografi juga merupakan tahapan terakhir pengumpulan data dalam penulisan sejarah menggabungkan berbagai data yang telah diperoleh.

Historiografi merupakan puncak kegiatan penelitian sejarah setelah memilih subjek yang diminati dalam penelitian sejarah, kemudian mencari sumber-sumber dan menafsirkannya ke dalam informasi yang terkandung didalamnya.

Penulisan laporan disusun berdasarkan serialisasi (kronologis, kausasi, dan imajinasi). Penulisan sejarah sebisa mungkin bisa berdasarkan kronologis, ini sangat penting agar peristiwa sejarah tidak menjadi kacau, walaupun dalam ilmu sosial kecuali sejarah kronologis dianggap tidak terlalu penting dan cenderung dikerjakan berdasarkan sistematika. Berbeda halnya dengan ilmu sejarah perubahan-perubahan sosial akan diurutkan berdasarkan kronologis.¹⁹

Pada tahapan ini penulis menggabungkan seluruh data kemudian selanjutnya menyajikan tulisan penelitian menggunakan kalimat yang efektif,

¹⁹ Kuntowidjoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995), hlm 103.

komunikatif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penulisan penelitian sejarah ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran jelas mengenai Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1948-1949.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan oleh penulis akan disesuaikan dengan pembahasan yang merujuk kepada pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi, sistematika yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I penulis akan menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian ini yang menjelaskan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan, sedikit upaya mengenai rencana belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Serta upaya Sultan Hamid II dalam mendirikan negara federal. Rumusan masalah yang disesuaikan dengan latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan teoritis, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada BAB II penulis akan membahas mengenai profil dari Sultan Hamid II. Riwayat beliau di lahirkan, riwayat pendidikannya sampai dengan diangkat menjadi Sultan Qadriyah.

Kemudian dalam BAB III membahas mengenai proses terbentuknya *Bijeenkomst voor Federale Overleg* (BFO). Dalam pembahasan pada bab III juga akan menjelaskan mengenai penunjukan Sultan Hamid II serta konflik yang terjadi didalam internal BFO dan rekasi Republik terhadap kehadiran BFO.

Pada BAB IV menyangkut Peranan Sultan Syarif Hamid II sebagai Ketua *Bijeenkomst voor federal overleg* (BFO) dalam Pembentukan Republik Indonesia

Serikat Tahun 1948-1949. Dalam bab IV ini penulis akan membahas bagaimana peranan yang dilakukan Sultan Syarif Hamid II ketika mengadakan Konferensi Inter-Indonesia dan juga Keikutsertaan-nya dalam Konferensi Meja Bundar.

BAB V ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diberikan penulis mengenai kajian yang telah dibahas, lalu dilakukan peringkasan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan hingga penerimaan saran yang dilakukan penulis. Bagian akhir ini berisi mengenai daftar pustaka berisi sumber-sumber referensi yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini. Beberapa sumber diantaranya dapat digunakan meliputi berupa buku referensi, dan sumber lainnya yang menunjang informasi untuk penulisan.